

ABSTRAK

Sekuritisasi narkoba melalui Kebijakan *War on Drugs* yang diterapkan selama masa Pemerintahan Presiden Duterte menghasilkan 5.584 pembunuhan tersangka narkoba oleh Kepolisian Filipina. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan tersebut terhadap hak asasi manusia menggunakan metode penelitian studi pustaka dan konsep *state of exception* dari Carl Schmitt sebagai kerangka berpikir. Tulisan ini menemukan bahwa sekuritisasi menciptakan keadaan pengecualian, di mana tindakan darurat, pemberian kekuasaan luas kepada aparat keamanan, dan penangguhan hak terjadi. Presiden Duterte meluncurkan *Project Double Barrel* sebagai tindakan darurat, memberikan kekuasaan yang luas kepada polisi dalam menindak tersangka narkoba, dan menanggihkan hak-hak dasar masyarakat melalui pembunuhan tanpa melalui proses hukum atau *extrajudicial killing*. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menyimpulkan bahwa sekuritisasi narkoba melalui Kebijakan *War on Drugs* di Filipina pada periode 2016 - 2022 telah berdampak terhadap pelanggaran hak asasi manusia berupa hak atas hidup dan hak atas peradilan yang adil. Hal ini karena terjadi penyalahgunaan kekuasaan ketika ketiga elemen *state of exception* tersebut di implementasikan.

Kata Kunci: Kebijakan *War on Drugs* Filipina, Sekuritisasi, *State of Exception*

ABSTRACT

The securitization of narcotics through the War on Drugs policy under President Duterte's administration in the Philippines led to 5,584 killings of drug suspects by the Philippine National Police. This paper aims to investigate the impact of the policy on human rights using a literature review method and the concept of the state of exception by Carl Schmitt as a theoretical framework. The findings reveal that securitization creates a state of exception, where emergency measures, extensive empowerment of security forces, and suspension of rights occur. President Duterte initiated Project Double Barrel as an emergency measure, granting broad powers to the police in tackling drug suspects and suspending basic rights through extrajudicial killings. This paper concludes that the securitization of drugs through the War on Drugs Policy in the Philippines has led to violations of human rights, particularly the right to life and the right to fair trial due to the misuse of power in implementing the state of exception elements.

Keyword: Philippines War on Drugs Policy, Securitization, State of Exception